



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 5/M.PPN/HK/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dilakukan penetapan Data Prioritas dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Kerja Pemerintah, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak;
 - b. bahwa untuk menetapkan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Data Prioritas Tahun 2024 dengan melibatkan Walidata tingkat pusat, Pembina Data tingkat pusat, dan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, serta difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat Data yang meliputi:
- a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data Keuangan Negara tingkat pusat.
- KETIGA : Data Prioritas 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - c. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
 - d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - e. kebutuhan mendesak berdasarkan arahan Presiden dan/atau Hasil Rapat Dewan Pengarah; dan
 - f. usulan Walidata tingkat pusat berdasarkan pada peraturan perundang undangan.
- KEEMPAT : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat Produsen Data untuk masing-masing Data, dan jadwal rilis dan/atau penutakhiran Data.

KELIMA...

- KELIMA : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib dikumpulkan oleh Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan pemenuhan terhadap Prinsip Satu Data Indonesia.
- KETUJUH : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Daftar Data tingkat Daerah.
- KEDELAPAN : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat rincian yang akan diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata, untuk kemudian diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat pusat.
- KESEMBILAN : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang telah ditetapkan dapat dimutakhirkan berdasarkan adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan dan/atau adanya kebijakan tertentu, dan disepakati melalui Forum Satu Data Indonesia untuk Pemutakhiran Data Prioritas Tahun 2024.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024 dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas *Tn*



Teni Widuriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 5 /M.PPN/HK/01/2024
TANGGAL 31 JANUARI 2024

DATA PRIORITAS TAHUN 2024

LAMPIRAN DATA PRIORITAS TAHUN 2024

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1	Jumlah anggaran untuk pelestarian arsip	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Arsip Nasional Republik Indonesia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
2	Jumlah Naskah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Aplikasi SPBE, SRIKANDI)	Statistik	Arsip Nasional Republik Indonesia	Arsip Nasional Republik Indonesia	Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang RKP Tahun 2024, Penerapan SPBE Terintegrasi (Prioritas Nasional 07.04.03.02)	Nasional	Harian
3	Jumlah Pengguna Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Aplikasi SPBE, SRIKANDI)	Statistik	Arsip Nasional Republik Indonesia	Arsip Nasional Republik Indonesia	Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang RKP Tahun 2024, Penerapan SPBE Terintegrasi (Prioritas Nasional 07.04.03.02)	Nasional	Harian
4	Atlas Capaian Indikator TPB/SDGs	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG	1:250000	Tahunan
5	Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CTSRST)	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:5.000	Tahunan
6	Data Anomali Gayaberat	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
7	Data Pasang Surut	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Harian
8	Data Perekaman Gayaberat	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
9	Data Perekaman Pasang Surut	Geospasial	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Harian
10	Data RINEX CORS	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Harian
11	Data RINEX Titik Pantau Geodinamika	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
12	Data Spasial Tanda Batas Negara skala 1:5.000	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	RPJMN 2020-2024	1:5.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
13	Datum Pasang Surut	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
14	Digital Surface Model (DSM)	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:5.000	Tahunan
15	Digital Terrain Model (DTM)	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:5.000	Tahunan
16	Garis Pantai sebagai unsur Rupa Bumi Indonesia skala 1:5.000 Wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial	1:5.000	Tahunan
17	Hipsografi Laut	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial	1:50.000	Tahunan
18	Indeks Tutupan Hijau Pengunungan skala 1:250.000	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Hasil Koordinasi Permintaan Data Capaian TPB/SDGs Indikator 15.4.2 Indeks Tutupan Hijau Pengunungan (Surat Nomor T-17094/Dt.3.2/PP.06.01/09/2023)	1:250.000	Tahunan
19	Jaring Kontrol Geodesi	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
20	Kompilasi Data Spasial Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan sebagai unsur Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:10.000 di Region Sulawesi	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	RPJMN 2020-2024	1:10.000	Tahunan
21	Konstanta Harmonik Pasang Surut	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
22	LAS Point (Point Cloud Lidar)	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:5.000	Tahunan
23	Model Deformasi	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
24	Model Geoid	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
25	Model Pasang Surut	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
26	Mosaik Foto Udara	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:5.000	Tahunan
27	Orthorectified Radar Image / Colorized Orthorectified Radar Imagery	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:5.000	Tahunan
28	Peta angka anak tidak sekolah jenjang SD, SMP & SMA	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
29	Peta angka partisipasi murni jenjang Perguruan Tinggi	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
30	Peta angka prevalensi kontrasepsi	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
31	Peta angka prevalensi kontrasepsi modern	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
32	Peta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
33	Peta Neraca Sumber Daya Laut dan Pesisir Skala 1:50.000 Kawasan Konservasi Laut Sawu (NTT) dan Kapoposang (Sulse)	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Neraca Sumberdaya Laut	1:50.000	Tahunan
34	Peta Neraca Sumberdaya Lahan Skala 1:250.000	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan BPS Nomor B-298/07100/KS.000/05/2023 Hal Dukungan Penyusunan Pemetaan Neraca Penutup Lahan	1:250.000	Tahunan
35	Peta persentase individu berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
36	Peta persentase individu perempuan usia 15-64 yang mengalami KDRT dalam 6 bulan terakhir	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
37	Peta persentase keluarga dengan rumah berstatus hak milik dan hak sewa/kontrak	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
38	Peta persentase keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengakses internet selama 6 bulan terakhir	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
39	Peta persentase perempuan usia reproduksi yang kebutuhan KB tidak terpenuhi	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
40	Peta proporsi individu berusia 15-24 tahun yang tidak bekerja dan tidak sekolah	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
41	Peta proporsi individu di atas 15 tahun yang tidak bekerja dan tidak sekolah	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
42	Peta proporsi individu keluarga berusia di atas 5 tahun yang mengakses internet	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
43	Peta proporsi keluarga dengan atap, lantai, dinding, dan luas bangunan rumah yang layak	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
44	Peta proporsi keluarga dengan fasilitas sanitasi layak	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
45	Peta proporsi keluarga yang menggunakan sumber air minum layak	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
46	Peta proporsi pekerja informal	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
47	Peta proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan 18 tahun	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
48	Peta proporsi usia muda atau dewasa yang berpartisipasi dalam pendidikan formal	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
49	Peta Rasio APK antara perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan SD, SMP & SMA	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
50	Peta rasio APM jenjang SD antara perempuan dan laki-laki	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
51	Peta rasio elektrifikasi	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
52	Peta rasio penggunaan gas rumah tangga	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
53	Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:25.000	Tahunan
54	Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:5.000 Wilayah Sulawesi	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:5.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
55	Peta tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang SD, SMP, & SMA	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Surat Dukungan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 07509/D.3/07/2020 Hal Tanggapan atas Permohonan Dukungan Kegiatan Sistem Informasi Spasial Statistik	1:10.000	Tahunan
56	Sistem Lahan (Morfologi) dan Morfometri Bentang Lahan	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Informasi Geospasial	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Keputusan Kepala BIG 16/2023 tentang Wali Data IGT	1:50.000	Tahunan
57	Titik Kontrol Tanah	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:1.000	Tahunan
58	Toponim	Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Renstra BIG Tahun 2020-2024	1:5.000	
59	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
60	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
61	Jumlah Dokumen Kesepakatan Teknis Batas Negara di Darat yang Tersusun	Statistik	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	RPJMN 2020-2024	Nasional	Tahunan
62	Jumlah Dokumen Kesepakatan Teknis Batas Negara di Laut yang Tersusun	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Badan Informasi Geospasial	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
63	Rasio Laju Perluasan Lahan Terbangun Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk	Statistik	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial	Perpres Nomor 111 Tahun 2022 Metadata Indikator SDGs/TPB Pilar Lingkungan Edisi II Nota Dinas dari Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Nomor 200/PP.10.01/02/2023 Hal Permohonan Data Sektoral Capaian SDGs 2022 untuk Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan TPB/SDGs 2022	1:250.000	Tahunan
64	Data Statistik Aparatur Sipil Negara Indonesia (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
65	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut jabatan fungsional tertentu dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
66	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut jenis jabatan dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
67	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut jenis kelamin dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
68	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut kelompok umur dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
69	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut lokasi kerja dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
70	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut masa kerja dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
71	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut golongan dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
72	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut golongan ruang dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
73	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut jenis Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
74	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
75	Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Semesteran
76	Jumlah Prediksi Pegawai Negeri Sipil yang Akan Pensiun dirinci menurut instansi	Statistik	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023	Nasional	Tahunan
77	Sebaran persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Geospasial	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
78	Angka kelahiran remaja pada kelompok umur 15-19 tahun per 1000 wanita di kelompok umur yang sama	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
79	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
80	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
81	Indeks Karakter Remaja	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
82	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
83	Indeks Kerentanan Keluarga	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Renstra 2020-2024	Nasional	Tahunan
84	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
85	Indeks Lansia Tangguh	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Renstra 2020-2024	Nasional	Tahunan
86	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Renstra 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
87	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Renstra 2020-2024	Provinsi	Tahunan
88	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
89	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
90	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi modern	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
91	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
92	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
93	Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
94	Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
95	Persentase pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need)	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
96	Persentase pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
97	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
98	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/Discontinuation of Contraceptive Rate (DCR) 12 bulan	Statistik	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
99	Peta Anomali Bouguer Indonesia	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:1.000.000	Tahunan
100	Peta Informasi Curah Hujan	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:50.000	Bulanan
101	Peta Informasi Hari Tanpa Hujan	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:50.000	Bulanan
102	Peta Klimatologis Angin Permukaan Laut	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:10.000	Bulanan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
103	Peta Komponen Deklinasi Magnet Bumi Indonesia	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:1.000.000	> Dua Tahunan
104	Peta Posisi Ketinggian Hilal Indonesia	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:1.000.000	Bulanan
105	Peta Potensi Energi Matahari	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1:50.000	> Dua Tahunan
106	Peta Potensi Energi Angin	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1:50.000	> Dua Tahunan
107	Peta Prakiraan Musim	Geospasial	Badan Pangan Nasional	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	1:100.000	Semesteran
108	Peta Proyeksi Perubahan Curah Hujan	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009, Rencana Pembangnan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1:25.000	> Dua Tahunan
109	Peta Proyeksi Perubahan Suhu Udara	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009, Rencana Pembangnan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1:25.000	> Dua Tahunan
110	Peta Radar Cuaca	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:17.000.000	Harian
111	Peta Sambaran Petir Indonesia	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:1.000.000	Bulanan
112	Peta Seismisitas Gempa Bumi Indonesia	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:25.000	Bulanan
113	Peta Tinggi Gelombang	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:10.000	Bulanan
114	Peta Wilayah Waktu Indonesia	Geospasial	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	UU No. 31 Tahun 2009	1:1.000.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
115	Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang meningkat pemahaman iklim melalui sekolah lapang iklim	Statistik	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
116	Persentase akurasi informasi iklim	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
117	Persentase akurasi informasi klimatologi	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
118	Persentase akurasi informasi meteorologi	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
119	Persentase akurasi informasi meteorologi maritim	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
120	Persentase akurasi informasi meteorologi penerbangan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
121	Persentase akurasi informasi meteorologi publik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
122	Angka prevalensi penyalahguna narkoba	Statistik	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
123	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	Statistik	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
124	Indeks Ketahanan Diri Remaja	Statistik	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
125	Jumlah kawasan yang pulih dari tanaman terlarang	Statistik	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
126	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Statistik	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
127	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Statistik	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
128	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	Statistik	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
129	Peta Risiko Bencana Banjir	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
130	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
131	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
132	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
133	Peta Risiko Bencana Gempabumi	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
134	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
135	Peta Risiko Bencana Kekeringan	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
136	Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
137	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
138	Peta Risiko Bencana Tsunami	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
139	Jumlah Kerugian nominal akibat bencana alam	Keuangan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
140	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
141	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
142	Indeks Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
143	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
144	Indeks Ketahanan Daerah	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
145	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
146	Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancamana bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
147	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
148	Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
149	Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
150	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
151	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana per kota	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
152	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
153	Jumlah kerugian ekonomi langsung pada kota terdampak bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
154	Jumlah kerugian ekonomis langsung diakibatkan rusak dan hancurnya infrastruktur vital akibat bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
155	Jumlah kerugian langsung bidang pertanian akibat bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
156	Jumlah korban hilang akibat bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
157	Jumlah korban mengungsi akibat bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
158	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
159	Jumlah korban meninggal akibat bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
160	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana per 100.000 orang	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
161	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
162	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
163	Jumlah korban terluka akibat bencana per 100.000 orang	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
164	Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
165	Jumlah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menerapkan strategi bencana nasional	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
166	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
167	Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
168	Jumlah rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
169	Jumlah rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
170	Jumlah rumah rusak akibat bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
171	Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
172	Jumlah Sistem Mitigasi Multiancamanan Bencana (MHEWS) terpadu	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
173	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
174	Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
175	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
176	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
177	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
178	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
179	Skor Indeks pemulihan pasca bencana	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Kabupaten/Kota	Tahunan
180	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
181	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
182	Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
183	Indeks Risiko Terorisme (Target)	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
184	Indeks Terorisme Global	Statistik	Kementerian Pertahanan	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
185	Jumlah deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
186	Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
187	Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	Statistik	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
188	Jumlah Distress Alert yang Terdeteksi di Wilayah Indonesia	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
189	Jumlah keseluruhan Korban (selamat, meninggal dunia, dan hilang) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
190	Jumlah Keseluruhan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
191	Jumlah Korban (selamat, meninggal dunia, dan hilang) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan bencana	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
192	Jumlah Korban (selamat, meninggal dunia, dan hilang) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan kecelakaan dengan penanganan khusus	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
193	Jumlah Korban (selamat, meninggal dunia, dan hilang) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan kecelakaan kapal	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
194	Jumlah Korban (selamat, meninggal dunia, dan hilang) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan kecelakaan pesawat	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
195	Jumlah Korban (selamat, meninggal dunia, dan hilang) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan kondisi membahayakan manusia	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
196	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada bencana	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
197	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan kapal	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
198	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan penanganan khusus	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
199	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan pesawat	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
200	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kondisi membahayakan manusia	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Renstra Basarnas 2020-2024	Nasional	Tahunan
201	Rata-rata (keseluruhan) respon time operasi pencarian dan pertolongan	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
202	Rata-rata response time operasi pencarian dan pertolongan pada bencana	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
203	Rata-rata response time operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
204	Rata-rata response time operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
205	Rata-rata response time operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
206	Rata-rata response time operasi pencarian dan pertolongan pada kondisi membahayakan manusia	Statistik	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
207	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 18 PKSN	Statistik	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
208	Jumlah Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Pertahanan dan Keamanan (Hankam)	Statistik	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
209	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan sarana prasarana pertahanan dan keamanannya	Statistik	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
210	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Badan Pangan Nasional	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
211	Indeks Ketahanan Pangan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
212	Jumlah cadangan beras	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
213	jumlah kebutuhan pangan pokok	Statistik	Kementerian Pertanian	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
214	Jumlah ketersediaan akses dan pangan	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pangan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
215	Jumlah Ketersediaan beras	Statistik	Kementerian Pertanian	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
216	Jumlah ketersediaan protein hewani	Statistik	Kementerian Pertanian	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
217	Jumlah Konsumsi daging	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
218	Jumlah Konsumsi ikan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
219	Jumlah Konsumsi kacang-kacangan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
220	Jumlah Konsumsi protein asal ternak	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
221	Jumlah Konsumsi sayur dan buah	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
222	Jumlah Penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
223	Jumlah stok pangan pokok	Statistik	Kementerian Pertanian	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
224	Koefisien Variasi Harga Pangan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
225	Persentase daerah rentan rawan pangan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
226	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
227	Persentase peningkatan konsumsi daging	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
228	Persentase peningkatan konsumsi protein asal ternak	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
229	Persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
230	Rata-rata Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
231	Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
232	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Statistik	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
233	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Kabupaten atau Kota asal	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
234	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Negara Penempatan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
235	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pendidikan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
236	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Penempatan G to G	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
237	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
238	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Provinsi Asal	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
239	Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Asal Kabupaten atau Kota	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
240	Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Kategori Kasus	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
241	Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Negara Penempatan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
242	Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Status Kasus	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
243	Jumlah Jabatan pada Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Jenis Jabatan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	UU No. 18 Tahun 2017	Nasional	Bulanan
244	Jumlah Jabatan pada Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	UU No. 18 Tahun 2017	Nasional	Bulanan
245	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Jabatan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
246	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
247	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Kawasan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
248	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pelaksana Penempatan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
249	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Status Pernikahan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
250	Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Asal Provinsi	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
251	Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Media Pengaduan	Statistik	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
252	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	Statistik	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
253	Jumlah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Statistik	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
254	Persentase K/L/Instansi Pemerintahan Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan Ideologi Pancasila	Statistik	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
255	Rekomendasi pembinaan ideologi Pancasila yang disampaikan kepada Presiden	Statistik	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
256	Persentase Tingkat Opini Laporan Keuangan Badan Lainnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Statistik	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
257	Persentase Tingkat Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)	Statistik	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
258	Persentase Tingkat Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Statistik	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
259	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Statistik	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Rencana Strategis BPK RI 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
260	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Pusat, Badan Lainnya, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Statistik	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Rencana Strategis BPK RI 2020-2024	Nasional	Tahunan
261	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang memperoleh ijin edar Makanan Dalam (MD)	Statistik	Kementerian Perindustrian	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
262	Jumlah Industri Kecil Menengah yang memperoleh ijin edar Kosmetik	Statistik	Kementerian Perindustrian	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
263	Jumlah Nomor Izin Edar Obat	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Perpres No. 80 Tahun 2017	Nasional	Tahunan
264	Jumlah Nomor Izin Edar Obat Tradisional	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Perpres No. 80 Tahun 2017	Nasional	Tahunan
265	Jumlah Nomor Izin Edar Pangan Olahan	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Perpres No. 80 Tahun 2017	Nasional	Tahunan
266	Jumlah Nomor Izin Edar Suplemen Kesehatan	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Perpres No. 80 Tahun 2017	Nasional	Tahunan
267	Jumlah Nomor Notifikasi Kosmetika	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Perpres No. 80 Tahun 2017	Nasional	Tahunan
268	Jumlah Sarana Produksi Produk Obat Yang Bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Tools Global Benchmarking WHO	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
269	Jumlah UMKM Kosmetik	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Perpres No.2 Tahun 2022	Nasional	Tahunan
270	Jumlah UMKM Obat Tradisional	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Perpres No.2 Tahun 2022	Nasional	Tahunan
271	Jumlah UMKM Pangan Olahan	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Perpres No.2 Tahun 2022	Nasional	Tahunan
272	Persentase makanan memenuhi syarat	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
273	Persentase obat memenuhi syarat	Statistik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
274	Indeks Kerawanan Pemilu Kampanye di Media Sosial	Statistik	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Nasional	> Dua Tahunan
275	Indeks Kerawanan Pemilu Netralitas Aparatur Sipil Negara	Statistik	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Nasional	> Dua Tahunan
276	Indeks Kerawanan Pemilu Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri	Statistik	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Nasional	> Dua Tahunan
277	Indeks Kerawanan Pemilu Politik Uang	Statistik	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Nasional	> Dua Tahunan
278	Indeks Kerawanan Pemilu Politisasi Suku Agama Ras Antar Golongan	Statistik	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Nasional	> Dua Tahunan
279	Jumlah Pekerja Radiasi Lainnya	Statistik	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Renstra BAPETEN 2020-2024	Provinsi	Tahunan
280	Jumlah Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	Statistik	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Renstra BAPETEN 2020-2024	Provinsi	Tahunan
281	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH)Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
282	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book)Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
283	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan	Statistik	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
284	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern badan usaha	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
285	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
286	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
287	Sebaran lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang difasilitasi dan dikembangkan	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
288	Nilai Realisasi Belanja Dan Penerimaan PNPB BP Batam	Keuangan	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Triwulanan
289	Jumlah Data Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
290	Jumlah Data Pengelolaan Pengaduan PTSP BP Batam	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
291	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus Dan Kawasan Industri Batam	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	> Dua Tahunan
292	Jumlah Kegiatan Bongkar Muat Kapal	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Bulanan
293	Jumlah Kunjungan Pasien Rumah Sakit BP Batam	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Bulanan
294	Jumlah Penyelesaian Perizinan BP Batam	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Bulanan
295	Nilai Indikator Efisiensi Dan Layanan Unggulan RSBP	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Bulanan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
296	Nilai Realisasi Investasi Asing Batam	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Triwulanan
297	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
298	Rekapitulasi Top Kasus Penyakit di Rumah Sakit BP Batam	Statistik	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rencana Strategis BP Batam 2020-2024	Kabupaten/Kota	Bulanan
299	Peta sebaran angkatan kerja	Geospasial	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	1:50.000	Tahunan
300	Peta sebaran penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap	Geospasial	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	1:50.000	Tahunan
301	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
302	Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
303	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
304	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat menurut Kelompok Pengeluaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
305	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/ Sederajat menurut Kelompok Pengeluaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
306	Garis kemiskinan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
307	Harapan Lama Sekolah	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
308	Indeks Demokrasi Indonesia	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
309	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
310	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
311	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kesetaraan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
312	Indeks Desa	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
313	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Bulanan
314	Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
315	Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
316	Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
317	Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
318	Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
319	Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
320	Indeks Kebebasan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
321	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
322	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
323	Indeks Pembangunan Manusia	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
324	Indeks Pembangunan Manusia per jenis kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
325	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
326	Indeks Perilaku Anti Korupsi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
327	Indikator Anomali Harga Pangan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
328	Inflasi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Bulanan
329	Inflasi Komponen Bergejolak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
330	Jumlah anggota parlemen laki-laki dan perempuan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
331	Jumlah angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
332	Jumlah K/L/D/I yang meminta rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
333	Jumlah K/L/D/I yang telah menyampaikan metadata kegiatan statistik sektoral	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
334	Jumlah Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
335	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
336	Jumlah Pekerja Formal yang memiliki Jaminan Sosial (Kesehatan, Kecelakaan kerja, Kematian, hari tua, pensiun kehilangan pekerjaan dan cuti)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
337	Jumlah pekerja setengah penganggur (orang)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
338	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi dan kegiatan seminggu yang lalu	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
339	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
340	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
341	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pusat Statistik	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Kabupaten/Kota	> Dua Tahunan
342	Jumlah penduduk menurut kelompok umur	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pusat Statistik	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Kabupaten/Kota	> Dua Tahunan
343	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam jabatan teknis dan sejenis	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
344	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
345	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
346	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam jabatan tata usaha dan sejenis	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
347	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam jabatan tenaga usaha jasa	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
348	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam jabatan tenaga usaha penjualan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
349	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
350	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Semesteran
351	Jumlah Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
352	Jumlah pengangguran (orang)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
353	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
354	Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil	Statistik	Kementerian Perindustrian	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
355	Jumlah publikasi hasil Sensus Pertanian 2023	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
356	Jumlah publikasi statistik bidang Neraca Ekonomi dan Bidang Statistik Makroekonomi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
357	Jumlah publikasi statistik bidang pariwisata	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
358	Jumlah publikasi Statistik E-Commerce	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
359	Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Dan Sedang	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
360	Kontribusi ekspor industri pengolahan terhadap total ekspor non migas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
361	Kontribusi NTB Sektor Industri Pengolahan terhadap PDB	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
362	Kontribusi NTB Subsektor Industri Pengolahan Migas terhadap PDB	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
363	kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
364	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDB Riil per Orang Bekerja per Tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	nasional	Tahunan
365	Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahunan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
366	Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
367	Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor informasi dan komunikasi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
368	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Per Kapita	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
369	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut provinsi/kabupaten/kota	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
370	Nilai ekspor nonmigas menurut HS 2 digit	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
371	Nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
372	Nilai Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
373	Nilai tambah industri manufaktur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
374	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
375	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
376	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
377	Nilai Tukar Petani (NTP)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
378	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
379	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
380	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
381	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
382	Persentase Anak Usia 10-17 tahun yang bekerja menurut Jenis Kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
383	Persentase anak yang tidak bersekolah menurut kelompok umur (7-12, 13-15, dan 16-18)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
384	Persentase angka melek aksara/huruf penduduk usia 15 tahun ke atas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
385	Persentase angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
386	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
387	Persentase dan Jumlah Anak Usia 10-17 tahun yang bekerja menurut Kelompok Umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
388	Persentase K/L/D/I yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
389	Persentase K/L/D/I yang telah menyampaikan metadata kegiatan statistik sektoral	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
390	Persentase Kemiskinan Perdesaan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
391	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
392	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
393	Persentase Pekerja Infomal yang memiliki Jaminan Sosial (Kesehatan, Kecelakaan kerja dan Kematian)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
394	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
395	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
396	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
397	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
398	Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
399	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
400	Persentase penduduk umur \geq 15 tahun yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
401	Persentase Penduduk umur 10-18 tahun yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
402	Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
403	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
404	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
405	Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan keluhan kesehatan tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari (Angka Kesakitan)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
406	Persentase Penduduk Usia 16-30 Tahun yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Selain di Tempat Kerja/Sekolah dalam Setahun Terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
407	Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
408	Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	> Dua Tahunan
409	Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas yang mempunyai nomor induk kependudukan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
410	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
411	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
412	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
413	Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
414	Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
415	Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
416	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	> Dua Tahunan
417	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
418	Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir dan kelahiran ALH yang terakhir ditolong oleh tenaga kesehatan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
419	Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir dan kelahiran ALH yang terakhirnya di fasilitas kesehatan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
420	Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir dan kelahiran Anak Lahir Hidup (ALH) yang terakhir tidak di fasilitas kesehatan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
421	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
422	Persentase Perkembangan ekspor nonmigas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
423	Persentase Perkembangan ekspor produk industri berteknologi tinggi	Statistik	Kementerian Perdagangan	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
424	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
425	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
426	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
427	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan jenis bukti kepemilikan tahan bangunan tempat tinggal berupa sertifikat	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
428	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal sewa/kontrak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
429	Persentase rumah tangga menurut bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
430	Persentase rumah tangga menurut fasilitas tempat buang air besar	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
431	Persentase rumah tangga menurut luas lantai rumah bangunan tempat tinggal	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
432	Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
433	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	
434	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
435	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
436	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	
437	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
438	Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber/fasilitas air minum di rumah/kawasan dalam pagar rumah (on-premises), tidak pernah mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan rumah tangga selama minimal 24 jam, dan memenuhi persyaratan kualitas fisik air minum	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
439	Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan Upacara Adat selama Setahun Terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
440	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	> Dua Tahunan
441	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	> Dua Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
442	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	> Dua Tahunan
443	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
444	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
445	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
446	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur > 18 Tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
447	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
448	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Triwulanan
449	Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
450	Produk Domestik Bruto (PDB) Per kapita	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
451	Produktivitas Jagung	Statistik	Kementerian Pertanian	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
452	Produktivitas Kedelai	Statistik	Kementerian Pertanian	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
453	Produktivitas Padi	Statistik	Kementerian Pertanian	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
454	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	> Dua Tahunan
455	Proporsi Industri Kecil dengan Pinjaman atau Kredit	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
456	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
457	Proporsi Lapangan Kerja Informal, Berdasarkan Sektor dan Jenis Kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
458	Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil terhadap Total Nilai Tambah Sektor Industri	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
459	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB dan per Kapita	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
460	Proporsi penduduk yang Hidup di bawah 50 persen dari Median Pendapatan, Menurut status Penyandang Disabilitas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	nasional	Tahunan
461	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pendapatan menurut provinsi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
462	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
463	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
464	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
465	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
466	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
467	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
468	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
469	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
470	Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas penyehatan dasar	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
471	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi dasar	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
472	Proporsi rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan > 10 persen dari total pengeluaran rumah tangga	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
473	Proporsi rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan > 25 persen dari total pengeluaran rumah tangga	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
474	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
475	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
476	Proporsi wanita pernah kawin 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
477	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi/Sederajat untuk disabilitas/tanpa disabilitas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
478	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi/Sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
479	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi/Sederajat untuk perempuan/laki-laki	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
480	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi/Sederajat untuk Pedesaan/Perkotaan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
481	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
482	Rasio ekspor produk industri berteknologi tinggi terhadap total ekspor	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
483	Rasio Gini	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
484	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
485	Rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas	Statistik	Kementerian Perindustrian	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
486	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
487	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
488	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
489	Tingkat Setengah Pengangguran	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
490	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
491	Unmet need pelayanan kesehatan: Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitas sehari-harinya dalam sebulan terakhir namun tidak rawat jalan	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
492	Upah Rata-Rata per Jam Pekerja	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
493	Volume Produksi jagung	Statistik	Kementerian Pertanian	Badan Pusat Statistik	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
494	Volume Produksi Padi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	
495	Data Citra satelit resolusi menengah (untuk peta skala 1: 50.000)	Geospasial	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Peraaturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018	1:50.000	Tahunan
496	Data Citra Satelit resolusi tinggi (untuk skala peta 1:25.000)	Geospasial	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018	1:25.000	Tahunan
497	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Badan Riset dan Inovasi Nasional	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
498	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Badan Riset dan Inovasi Nasional	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
499	Indeks Daya Saing Daerah	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Peraturan BRIN no. 5 tahun 2023 (psl.1), Peraturan Gubernur di daerah	Kabupaten/Kota	Tahunan
500	Jumlah anggaran untuk Kebun Raya	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
501	Jumlah belanja Riset Nasional oleh Bisnis	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
502	Jumlah belanja Riset Nasional oleh Pemerintah	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
503	Jumlah belanja Riset Nasional oleh Perguruan Tinggi	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
504	Jumlah hasil audit teknologi industri	Statistik	Kementerian Perindustrian	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
505	Jumlah hasil riset terapan yang terkait bidang industri	Statistik	Kementerian Perindustrian	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
506	Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
507	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
508	Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi (KST) yang ada yang dikembangkan	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
509	Jumlah Kebun Raya Daerah yang dikembangkan	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
510	Jumlah mitra terfasilitasi	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
511	Jumlah Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
512	Jumlah penerapan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
513	Jumlah penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
514	Jumlah peserta program mobilitas talenta riset dan inovasi	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
515	Jumlah produk dari hasil riset	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
516	Jumlah Produk Inovasi dalam ekatalog pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
517	Jumlah Produk Inovasi dan Produk Riset Prioritas Riset Nasional/Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
518	Jumlah Produk Inovasi dari Tenant Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) yang Dibina	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
519	Jumlah publikasi ilmiah di Jurnal Internasional	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
520	Jumlah Pusat Kolaborasi Riset yang ditetapkan	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
521	Jumlah rancang bangun dan perekayasaan industri	Statistik	Kementerian Perindustrian	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
522	Jumlah SDM iptek yang ditingkatkan kualifikasinya	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
523	Jumlah Sumber Daya Manusia Iptek yang berkualifikasi S3	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
524	Jumlah talenta muda riset dan inovasi yang dibina	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
525	Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
526	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
527	Proporsi Demografi dan Kesehatan Indonesia	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Nasional	> Dua Tahunan
528	Proporsi Kehidupan Beragama	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006	Nasional	Tahunan
529	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Badan Siber dan Sandi Negara	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Siber dan Sandi Negara	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
530	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Badan Siber dan Sandi Negara	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Siber dan Sandi Negara	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
531	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor ESDA	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
532	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Industri	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
533	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Keuangan Perdagangan Pariwisata	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
534	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Media Transportasi TIK	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
535	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Pembangunan Manusia	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
536	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Pemerintah Daerah	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
537	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Pemerintah Pusat	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
538	Cyber Security Maturity (CSM) Sektor Energi Sumber Daya Alam	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
539	Cyber Security Maturity (CSM) Sektor Industri	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
540	Cyber Security Maturity (CSM) Sektor Keuangan Perdagangan Pariwisata	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
541	Cyber Security Maturity (CSM) Sektor Media Transportasi TIK	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
542	Cyber Security Maturity (CSM) Sektor Pembangunan Manusia	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
543	Cyber Security Maturity (CSM) Sektor Pemerintah Daerah	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
544	Cyber Security Maturity (CSM) Sektor Pemerintah Pusat	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Nasional	Tahunan
545	Global Cybersecurity Index (GCI)	Statistik	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
546	Jumlah Data Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional	Statistik	Badan Standardisasi Nasional	Badan Standardisasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
547	Jumlah Data pelaku usaha yang telah tersertifikasi Standar Nasional Indonesia	Statistik	Badan Standardisasi Nasional	Badan Standardisasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
548	Jumlah Data Standar Nasional Indonesia sesuai kebutuhan nasional	Statistik	Badan Standardisasi Nasional	Badan Standardisasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
549	Jumlah Data Usaha Mikro Kecil Menengah dan Organisasi yang mendapat pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia	Statistik	Badan Standardisasi Nasional	Badan Standardisasi Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
550	Jumlah Himpunan Keputusan DPD RI	Statistik	Dewan Perwakilan Daerah	Dewan Perwakilan Daerah	Renstra Setjen DPD RI	Nasional	Tahunan
551	Jumlah Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Statistik	Dewan Perwakilan Daerah	Dewan Perwakilan Daerah	Renstra Setjen DPD RI	Nasional	Tahunan
552	Jumlah Pemohon Informasi Layanan Publik	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
553	Presentase keterwakilan perempuan anggota DPR	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
554	Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
555	Rekapitulasi Rancangan Undang-Undang	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
556	Jumlah Jaksa di Kejaksaan Agung	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kejaksaan Republik Indonesia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
557	Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kejaksaan Republik Indonesia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
558	Jumlah Jaksa di Kejaksaan Tinggi	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kejaksaan Republik Indonesia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
559	Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT-TI	Statistik	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
560	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kementerian Agama	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Agama	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
561	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Kementerian Agama	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Agama	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
562	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
563	Jumlah aktor-aktor kerukunan umat beragama (orang)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
564	Jumlah dan Proporsi MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
565	Jumlah dan Proporsi MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
566	Jumlah dan Proporsi MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
567	Jumlah dan Proporsi MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
568	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Individu	Triwulanan
569	Jumlah dokumen registrasi halal produk impor	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
570	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
571	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hittaya sukhaya (keluarga)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
572	Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi (unit)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
573	Jumlah Negara asal impor produk halal	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Individu	Bulanan
574	Jumlah nilai impor produk halal	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
575	Jumlah perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai sertifikat halal	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
576	Jumlah seluruh RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
577	Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
578	Jumlah Sertifikat Halal di sektor industri	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
579	Jumlah volume impor produk halal	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
580	Persentase dan Jumlah guru di jenjang pendidikan RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
581	Persentase dan Jumlah guru di jenjang pendidikan RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
582	Persentase dan Jumlah guru pada tingkat pendidikan RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
583	Persentase dan Jumlah guru pada tingkat pendidikan RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
584	Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
585	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
586	Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
587	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
588	Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
589	Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
590	Persentase lembaga agama dan lembaga keagamaan yang difasilitasi (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
591	Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
592	Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
593	Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
594	Persentase pesantren yang berwawasan moderat (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
595	Persentase petugas haji profesional	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
596	Persentase produk yang tersertifikasi halal (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
597	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
598	Persentase rumah ibadah yang ramah (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
599	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
600	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
601	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama (persen)	Statistik	Kementerian Agama	Kementerian Agama	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
602	Jumlah aset BUMN	Keuangan	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
603	Jumlah Kontribusi BUMN penerimaan	Keuangan	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
604	Jumlah Net Profit BUMN	Keuangan	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
605	Persentase Return on Asset (BUMN)	Keuangan	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020 - 2024, Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
606	Jumlah BUMN	Statistik	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
607	Peta Batas Administrasi	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
608	Peta Batas Administrasi Desa	Geospasial	Kementerian Pertanian	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
609	Peta Batas Wilayah Administratif Level Provinsi hingga Level Desa	Geospasial	Kementerian Pertanian	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
610	Jumlah anggaran mandatory spending sesuai amanat UU No. 1/2022 tentang HKPD	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
611	Jumlah Daerah yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) - Kementerian Dalam Negeri	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
612	Jumlah daerah yang mengakses Pinjaman Daerah (Kementerian Dalam Negeri)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
613	Jumlah Penganggaran SPM secara keseluruhan dan pada 6 bidang di daerah	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
614	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kementerian Dalam Negeri	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
615	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Kementerian Dalam Negeri	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
616	Capaian penerapan SPM 6 bidang di daerah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
617	Data Skor Indeks Demokrasi Indonesia (Nasional, Pusat, Provinsi, per Dimensi)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
618	Indeks Capaian Revolusi Mental	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
619	Indeks Inovasi Daerah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
620	Indeks kinerja GWPP	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
621	Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
622	Jumlah daerah (kabupaten/kota) di Indonesia	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
623	Jumlah daerah di wilayah 3T yang mendapatkan peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
624	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
625	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
626	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
627	Jumlah Desa beserta kodenya	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Desa/Kelurahan	Tahunan
628	Jumlah Desa yang Datanya Terpublikasi Secara Online	Statistik	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	RPJMN 2020 - 2025	Desa/Kelurahan	Tahunan
629	Jumlah desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya	Statistik	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	RPJMN 2020 - 2024	Desa/Kelurahan	Tahunan
630	Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
631	Jumlah kabupaten/kota	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
632	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Jakstrada air minum	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
633	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki RISPAM	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
634	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
635	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
636	Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
637	Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
638	Jumlah pedoman/kebijakan/SOP penyelenggaraan administrasi kependudukan yang disusun	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
639	Jumlah Pemerintah daerah yang telah memiliki peraturan tentang Bangunan Gedung Hijau/sejenis	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
640	Jumlah Penerimaan Daerah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
641	Jumlah pengurus ormas yang mendapat penguatan ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
642	Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
643	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
644	Jumlah Provinsi	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
645	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
646	Jumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
647	Jumlah RT/RW (Nasional, Pulau, Provinsi, Kabupaten, Kota)	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Desa/Kelurahan	Tahunan
648	Jumlah rumah tangga yang mengibarkan/memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
649	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Desa/Kelurahan	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
650	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Semesteran
651	Jumlah total kecamatan di Indonesia	Statistik	Badan Pusat Statistik	Kementerian Dalam Negeri	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
652	Jumlah total rumah tangga di Indonesia	Statistik	Badan Pusat Statistik	Kementerian Dalam Negeri	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
653	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
654	Luas Penetapan LP2B (Perda, Peraturan Bupati/Walikota, SK Bupati/Walikota)	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
655	Luas wilayah desa	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Desa/Kelurahan	Tahunan
656	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
657	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
658	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
659	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
660	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
661	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
662	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
663	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiananya dilaporkan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Semesteran

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
664	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Semesteran
665	Persentase capaian SPM	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
666	Persentase penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Semesteran
667	Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
668	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
669	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
670	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000	Geospasial	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1:50.000	Tahunan
671	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000	Geospasial	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1:50.000	Tahunan
672	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
673	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
674	Indeks Desa Membangun 2024	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Desa/Kelurahan	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
675	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
676	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
677	Jumlah BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
678	Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama Berdasarkan Kategori Jenis Usaha	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Provinsi	Tahunan
679	Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama Nasional	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Desa/Kelurahan	Tahunan
680	Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Provinsi	Tahunan
681	Jumlah daerah tertinggal	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
682	Jumlah Desa per Provinsi yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Provinsi	Tahunan
683	Jumlah Desa per Provinsi yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Provinsi	Tahunan
684	Jumlah Duta Digital Desa Cerdas Fase III	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
685	Jumlah Kebutuhan Daerah Tertinggal	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
686	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Ditempatkan di Kawasan Transmigrasi	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
687	Jumlah Lokasi Desa Cerdas Fase III	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Kecamatan	Tahunan
688	Jumlah Masyarakat Desa yang Diberi Pelatihan berdasarkan Jenis Pelatihan Tahun 2024	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Desa/Kelurahan	Tahunan
689	Jumlah pendamping desa yang diberdayakan	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
690	Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Renstra SETJEN DPR RI	Kabupaten/Kota	Tahunan
691	Jumlah Unit Pengelola Keuangan-Dana Bergulir Masyarakat yang Bertransformasi ke BUMDesa Bersama	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Provinsi	Tahunan
692	Jumlah, jenis usaha, dan status badan hukum BUMDesa/ BUMDesa Bersama	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Desa/Kelurahan	Tahunan
693	Nilai Omset BUMDesa/ BUMDesa Bersama	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Desa/Kelurahan	Tahunan
694	Peringkat BUMDes	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
695	Persentase kontribusi BUMDesa/ BUMDesa Bersama terhadap PADes	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029	Desa/Kelurahan	Tahunan
696	Peta Cekungan Air Tanah	Geospasial	Kementerian Pertanian	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
697	Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:250.000	Geospasial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
698	Peta cekungan sedimen	Geospasial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
699	Peta Penyalur BBM Satu Harga skala 1:50.000	Geospasial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
700	Peta sambungan rumah jaringan gas kota	Geospasial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
701	Peta Sumber Daya Batubara	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
702	Peta Sumber Daya Mineral	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
703	Peta Sumber Daya Panas Bumi	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
704	Peta Wilayah Kerja Migas	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
705	Sebaran Gardu Listrik	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
706	Sebaran kilang minyak	Geospasial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
707	Sebaran Pembangkit Listrik	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
708	Indeks Acceptability	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
709	Indeks Accessibility	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
710	Indeks Affordability	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
711	Indeks Availability	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
712	Indeks Ketahanan Energi	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
713	Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
714	Intensitas energi primer	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
715	Jumlah cadangan minyak dan gas bumi	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
716	Jumlah cadangan operasional BBM	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
717	Jumlah cost recovery yang harus dibayarkan pemerintah kepada pelaku usaha migas	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
718	Jumlah Daya Terpasang Listrik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Nasional	Tahunan
719	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
720	Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
721	Jumlah keluarga penerima bantuan konverter kit LPG 3 kg	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
722	Jumlah konsumsi komoditas tambang mineral logam dan Batubara	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
723	Jumlah Konsumsi listrik per kapita	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
724	Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
725	Jumlah pemanfaatan biofuel untuk domestik	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
726	Jumlah penambahan kapasitas pembangkit	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
727	Jumlah penambahan penyalur BBM satu harga	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
728	Jumlah penambahan sistem distribusi	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
729	Jumlah penambahan sistem transmisi	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
730	Jumlah pengguna listrik	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
731	Jumlah peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
732	Jumlah penyediaan gas	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
733	Jumlah produksi gas bumi	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
734	Jumlah produksi komoditas tambang mineral logam dan Batubara	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
735	Jumlah produksi tenaga listrik	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
736	Jumlah rekomendasi keprospekan migas	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
737	Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
738	Jumlah subsidi bahan bakar fosil	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
739	Jumlah Subsidi Bahan Bakar Minyak	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
740	Jumlah Subsidi Gas / LPG	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
741	Jumlah volume elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
742	Lifting minyak dan gas bumi	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
743	Panjang ruas pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon – Semarang	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
744	Panjang ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi (kumulatif)	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
745	Penurunan emisi CO2 pembangkit	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
746	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor energi	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
747	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline pada sektor energi	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
748	Penurunan intensitas energi final	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
749	Perkembangan cost recovery yang harus dibayarkan pemerintah	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
750	Perkembangan daya serap tenaga kerja di sektor hulu migas	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
751	Perkembangan gross split migas	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
752	Persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
753	Persentase pemanfaatan biofuel untuk domestik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
754	Persentase pemanfaatan gas bumi domestik	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
755	Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
756	Persentase Porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
757	Persentase Porsi kapasitas terpasang pembangkit Energi Baru Terbarukan terhadap total pembangkit	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
758	Persentase susut jaringan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
759	Rasio elektrifikasi	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Triwulanan
760	System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
761	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sektor energi baru terbarukan	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
762	Total kapasitas hasil produksi pembangkit listrik dari energi terbarukan	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
763	Total konsumsi energi final	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
764	Total konsumsi final energi terbarukan	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
765	Total Pasokan Energi Primer	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
766	Total Pasokan Energi Terbarukan	Statistik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
767	Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi	Statistik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
768	Jumlah organisasi bantuan hukum	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
769	Jumlah paten granted (domestik)	Statistik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
770	Jumlah pengungsi dari Luar Negeri	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
771	Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku dari Tahun 1945	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
772	Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku dari Tahun 1945	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
773	Jumlah permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) terkait APUPPT yang dibuat, diterima, diproses, diberikan, dan ditolak	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	FATF Recommendations	Nasional	Tahunan
774	Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik	Statistik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
775	Jumlah perusahaan industri yang memiliki sertifikat kekayaan intelektual	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
776	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Statistik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
777	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Statistik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
778	Persentase pelaku residivis	Statistik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
779	Persentase peningkatan pendaftaran jaminan fidusia	Statistik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
780	Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	Statistik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
781	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Statistik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
782	Persentase penyelesaian perizinan dasar	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
783	Peta Benda Muatan Kapal Tenggelam 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	> Dua Tahunan
784	Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	> Dua Tahunan
785	Peta Kerentanan Pesisir 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	> Dua Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
786	Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	Tahunan
787	Peta Lahan Garam 1:25.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:25.000	Tahunan
788	Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	> Dua Tahunan
789	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	> Dua Tahunan
790	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	> Dua Tahunan
791	Peta Sebaran Perikanan Budidaya 1:50.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
792	Peta Terumbu Karang 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	> Dua Tahunan
793	Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	Tahunan
794	Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	> Dua Tahunan
795	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 1:250.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:250.000	> Dua Tahunan
796	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan 1:50.000	Geospasial	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perpres Nomor 23 Tahun 2021	1:50.000	Tahunan
797	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
798	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
799	Angka Konsumsi Ikan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
800	Hasil Perikanan Tangkap, Budidaya	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
801	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nasional	Tahunan
802	Jumlah Kapal Nelayan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Utama KKP	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
803	Jumlah kasus Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Kabupaten/Kota	Tahunan
804	Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
805	Jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
806	Jumlah Kawasan wisata bahari yang dikelola	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
807	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
808	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Utama KKP	Nasional	Tahunan
809	Jumlah kelompok masyarakat yang disuluh	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Triwulanan
810	Jumlah kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
811	Jumlah klaster yang dibangun	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
812	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
813	Jumlah lokasi pengendalian pemanfaatan ruang laut	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
814	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
815	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
816	Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang dilatih	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Triwulanan
817	Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang ditingkatkan kompetensinya	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Triwulanan
818	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Utama KKP	Provinsi	Tahunan
819	Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
820	Jumlah pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
821	Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
822	Jumlah penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
823	Jumlah perikanan hasil budidaya	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
824	Jumlah perikanan hasil tangkapan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
825	Jumlah Produksi Berdasarkan Komoditas Ikan Utama	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
826	Jumlah produksi garam	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
827	Jumlah produksi hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Kelautan dan Perikanan	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Kabupaten/Kota	Tahunan
828	Jumlah Produksi ikan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
829	Jumlah Produksi Olahan Ikan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Utama KKP	Provinsi	Tahunan
830	Jumlah produksi rumput laut	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
831	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
832	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Utama KKP	Provinsi	Tahunan
833	Jumlah Sarana Biofarmakologi yang Dibangun	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
834	Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (ton)	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	> Dua Tahunan
835	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
836	Jumlah unit pengelola WPP	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
837	Jumlah WPP	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
838	luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
839	Luas Kumulatif Konservasi kawasan kelautan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
840	Maximum Sustainable Yield/jumlah potensi sumber daya ikan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
841	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Utama KKP	Provinsi	Tahunan
842	Nilai Tukar Produk Hasil Perikanan (NTPHP)	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Utama KKP	Nasional	Tahunan
843	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
844	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
845	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Triwulanan
846	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
847	Rata-rata hasil tangkapan yang dilaporkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (ton)	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
848	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
849	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
850	Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan	Statistik	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
851	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
852	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
853	Cakupan peserta PBI JKN	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
854	Jumlah anak usia 12-23 bulan yang pernah mendapat vaksinasi DPT dosis ketiga	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
855	Jumlah anak usia 12-23 bulan yang pernah mendapat vaksinasi PCV dosis kedua	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
856	Jumlah Bayi usia 6 bulan diberi ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
857	Jumlah ibu hamil usia 15-49 dengan anemia di suatu wilayah pada periode waktu tertentu	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
858	Jumlah ibu hamil usia 15-49 tahun yang diperiksa di suatu wilayah pada periode waktu tertentu	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
859	Jumlah Insidensi HIV	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
860	Jumlah kab/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
861	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
862	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
863	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
864	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
865	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
866	Jumlah Kematian Ibu	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Kesehatan	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Provinsi	Tahunan
867	Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
868	Jumlah puskesmas	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
869	Jumlah puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
870	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
871	Jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
872	Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis tenaga kesehatan tertentu	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
873	Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima vaksinasi PCV dosis kedua (Cakupan Imunisasi PCV-2)	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
874	Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima 2 dosis vaksin campak (Cakupan Imunisasi Campak-2)	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
875	Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima 3 dosis vaksin DPT (Cakupan Imunisasi DPT-3)	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
876	Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
877	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
878	Persentase Bayi usia 6 bulan diberi ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
879	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
880	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
881	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
882	Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
883	Persentase kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
884	Persentase kabupaten/kota sehat	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
885	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
886	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
887	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
888	Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
889	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
890	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
891	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
892	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
893	Persentase puskesmas tanpa dokter	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
894	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
895	Persentase rumah sakit terakreditasi	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
896	Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
897	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
898	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
899	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
900	Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Statistik	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
901	Jumlah Kapasitas Latih Lembaga Pelatihan Kerja	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
902	Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Bulanan
903	Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Bulanan
904	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
905	Jumlah pekerja yang mendapatkan pemahaman tata cara penyusunan PP/PKB	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
906	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Aplikasi Karirhub	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Triwulanan
907	Jumlah Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Bulanan
908	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Semesteran
909	Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Triwulanan
910	Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di Aplikasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Online	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Triwulanan
911	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
912	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
913	Jumlah peserta pemagangan dalam negeri	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
914	Jumlah peserta pemagangan luar negeri	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Semesteran
915	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Bulanan
916	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program Padat Karya	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
917	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program Tenaga Kerja Mandiri/Wirusaha	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
918	Jumlah tenaga kerja tersertifikasi	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Semesteran
919	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Statistik	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
920	Jumlah Anggaran (APBN)	Keuangan	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
921	Jumlah Daerah yang Melaksanakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Keuangan	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
922	Nilai Kurs Pajak	Keuangan	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan (Rilis Mingguan)	Nasional	Bulanan
923	Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa	Keuangan	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
924	Tarif Bunga	Keuangan	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga (Rilis Bulanan)	Nasional	Bulanan
925	Jumlah Belanja Negara	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
926	Jumlah Jalan Tol yang Merupakan Proyek Strategis Nasional yang Dilakukan Pengadaan Tanah	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
927	Jumlah perusahaan industri yang memiliki Authorized economic operator (Operator Ekonomi Bersertifikat)	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
928	Jumlah perusahaan industri yang memiliki fasilitas Kawasan Berikat	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
929	Jumlah perusahaan industri yang memiliki fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
930	Jumlah perusahaan industri yang memiliki MITA (Mitra Utama Kepabeanaan)	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
931	Persentase imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN)	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Harian
932	Persentase Rencana Anggaran untuk Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
933	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	
934	Rasio Penerimaan Perpajakan	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
935	Surplus/Defisit APBN terhadap PDB	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
936	Total APBN Tahun Berjalan	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
937	Total Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
938	Total Belanja Pemerintah Pusat	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
939	Total Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Lembaga Perbankan yang Bersumber dari Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Statistik	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Bulanan
940	Indeks Kemerdekaan Pers	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
941	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
942	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
943	Jumlah desa dalam satu provinsi yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
944	Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
945	Jumlah frekuensi radio yang belum digunakan	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
946	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart city	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
947	Jumlah Kecamatan yang tersambung Optical Distribution Point (ODP)	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
948	Jumlah Ketersediaan Base Transceiver Station Tower dan Akses Internet di Daerah Tertinggal	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
949	Jumlah konten negatif yang diblokir	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
950	Jumlah lembaga penyiaran publik lokal	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
951	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
952	Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
953	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
954	Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
955	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
956	Jumlah start-up aktif yang terbentuk	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
957	Jumlah tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
958	Jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (LPMB)	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
959	Jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband)	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
960	Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitas Adopsi Teknologi Digital UMKM	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
961	Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
962	Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
963	Persentase K/L yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/Government Network)	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
964	Persentase K/L/D yang memanfaatkan cloud pemerintah	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
965	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
966	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
967	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
968	Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kecamatan	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
969	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Statistik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
970	Indeks Kepemimpinan Maritim	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rencana Aksi Kebijakan Kelautan	Nasional	Tahunan
971	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
972	Jumlah sampah secara keseluruhan per tahun	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
973	Jumlah sampah terbuang ke laut	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
974	PDB Kemaritiman	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
975	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
976	Peta sebaran lokasi KEK berbasis pariwisata dan industri yang difasilitasi dan dikembangkan skala 1:50.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
977	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
978	Persentase penyerapan tenaga kerja di KEK berbasis pariwisata dan industri	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024	Kabupaten/Kota	Semesteran
979	Realisasi/rasio investasi KEK berbasis pariwisata dan industri	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Semesteran

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
980	Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	> Dua Tahunan
981	Jumlah Anggota Koperasi	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
982	Jumlah Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
983	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan melalui sinergi Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
984	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
985	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Penguatan Kelembagaan Koperasi di Wilayah Miskin Ekstrim	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
986	Jumlah Koperasi aktif	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
987	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
988	Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
989	Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
990	Jumlah Koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
991	Jumlah koperasi yang mendapatkan Dukungan Fasilitasi Factory Sharing	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
992	Jumlah koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
993	Jumlah koperasi yang mendapatkan Industrialisasi Koperasi Pangan Modern Melalui Rantai Pasok Produksi	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
994	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pembaharuan dan Inovasi Produk Koperasi Pangan Modern	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
995	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pembinaan Koperasi Pengelola Rumah Kemasan	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
996	Jumlah koperasi yang mendapatkan Peningkatan Skala Usaha Koperasi Melalui Kemitraan Strategis	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
997	Jumlah KSP yang mendapatkan Perizinan Berusaha	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
998	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Akutansi, Keuangan dan Manajemen Risiko Koperasi	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
999	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Bagi SDM Pengawas Koperasi	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1000	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Digitalisasi Koperasi	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1001	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi Modern	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1002	Jumlah pelaku usaha berdasarkan Lapangan Usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Renstra SETJEN DPR RI	Kabupaten/Kota	Bulanan
1003	Jumlah Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1004	Jumlah pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1005	Jumlah pembinaan Koperasi Pengelola Factory Sharing dan Rumah Kemasan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1006	Jumlah Startup yang dikembangkan melalui Inkubasi	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1007	Jumlah tenaga kerja di UMKM berdasarkan jenis kelamin Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Renstra SETJEN DPR RI	Kabupaten/Kota	Tahunan
1008	Jumlah tenaga kerja di UMKM berdasarkan skala usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Renstra SETJEN DPR RI	Kabupaten/Kota	Tahunan
1009	Jumlah UMKM berdasarkan bentuk usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Renstra SETJEN DPR RI	Kabupaten/Kota	Tahunan
1010	Jumlah UMKM berdasarkan sektor usaha, tenaga kerja, aset-omzet, dan Skala Usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022	Kabupaten/Kota	Tahunan
1011	Jumlah UMKM Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1012	Jumlah UMKM yang termasuk Kelompok/Klaster Usaha Mikro Unggulan yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Usaha	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1013	Jumlah Usaha Mikro (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1014	Jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan yang dibina	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1015	Jumlah Wirausaha Pengarustamaan yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1016	Jumlah wirausaha per tahun	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1017	Jumlah Wirausaha Sosial yang dikembangkan melalui sinergi Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1018	Jumlah wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1019	Jumlah wirausaha yang ditingkatkan melalui Dunia Usaha Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1020	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1021	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1022	Kontribusi koperasi terhadap PDB	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1023	Kontribusi UMKM terhadap PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1024	Kontribusi UMKM terhadap PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1025	Pertumbuhan wirausaha	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1026	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
1027	Rasio kewirausahaan	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
1028	Volume usaha koperasi	Statistik	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
1029	Peta izin pengelolaan hutan perhutanan sosial	Geospasial	Kementerian Pertanian	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
1030	Peta Kawasan Hutan / Peta Penetapan Kawasan Hutan	Geospasial	Kementerian Pertanian	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1031	Data besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam	Keuangan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1032	Jumlah anggaran untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1033	Jumlah anggaran untuk Taman Nasional, Cagar Alam, Tahura, Suakamargasatwa	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1034	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1035	Luas kawasan Hutan Lindung	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1036	Indeks daftar merah (Red-list index)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1037	Indeks Kualitas Air (IKA)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1038	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1039	Indeks Kualitas Lahan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1040	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1041	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1042	Indeks kualitas udara	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
1043	Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaannya	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1044	Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1045	Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1046	Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1047	Jumlah Baseline Merkuri yang telah ditetapkan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1048	Jumlah baseline perusak ozon yang telah ditetapkan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1049	Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1050	Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1051	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1052	Jumlah dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAN OGI VIII	Provinsi	Tahunan
1053	Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1054	Jumlah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAN OGI VIII	Provinsi	Tahunan
1055	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 secara terpadu yang terbangun	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1056	Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1057	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1058	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1059	Jumlah Izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAN OGI VIII	Provinsi	Tahunan
1060	Jumlah jenis satwa	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1061	Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1062	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1063	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1064	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1065	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1066	Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1067	Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1068	Jumlah Kebijakan, strategi, dan rencana aksi terkait Rencana dan Implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1069	Jumlah kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1070	Jumlah KPH Efektif	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1071	Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1072	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1073	Jumlah layanan balai kliring keanekaragaman hayati	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1074	Jumlah layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1075	Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1076	Jumlah limbah B3 yang dihasilkan per kapita	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1077	Jumlah limbah B3 yang terkelola	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1078	Jumlah limbah cair industri keseluruhan (yang dilaporkan)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1079	Jumlah limbah cair industri yang dikelola secara aman (yang dilaporkan)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1080	Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1081	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1082	Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1083	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1084	Jumlah luas kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1085	Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1086	Jumlah orang yang mendapatkan Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1087	Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1088	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1089	Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1090	Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1091	Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1092	Jumlah penghapusan Merkuri	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1093	Jumlah pengurangan Merkuri	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1094	Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1095	Jumlah penurunan konsumsi perusak ozon	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1096	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal) (orang)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1097	Jumlah peraturan atau kebijakan yang sah terkait peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	> Dua Tahunan
1098	Jumlah perizinan Berusaha terkait SDA-LH	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAN OGI VIII	Provinsi	Tahunan
1099	Jumlah persetujuan teknis terkait Pengelolaan Limbah B3	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAN OGI VIII	Nasional	Tahunan
1100	Jumlah persetujuan terkait usaha SDA-LH	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAN OGI VIII	Kabupaten/Kota	Tahunan
1101	Jumlah populasi jenis satwa sesuai baseline data tahun 2019	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1102	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1103	Jumlah produksi kayu dari hutan produksi	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1104	Jumlah rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1105	Jumlah semua Jenis Sampah	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1106	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1107	Jumlah sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1108	Jumlah situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1109	Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1110	Jumlah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAN OGI VIII	Provinsi	Tahunan
1111	Jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1112	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1113	Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1114	Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1115	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1116	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1117	Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1118	Luas deforestasi per tahun	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1119	Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1120	Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1121	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1122	Luas kawasan hutan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1123	Luas kawasan hutan produksi	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1124	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (ha)	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1125	Luas kawasan konservasi	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1126	Luas kawasan konservasi perairan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1127	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan konservasi	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1128	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan konservasi	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1129	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1130	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1131	Luas pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1132	Luas Penyebaran Lahan Kritis	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	5 Tahun
1133	Luas Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air 15 Danau Prioritas	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1134	Luas Rehabilitasi Danau Tangkapan Air (DTA) 15 danau prioritas	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1135	Luas Rehabilitasi di Kawasan Pesisir	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1136	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1137	Luas RHL pada hutan produksi	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1138	Luas Sumber TORA Dari Kawasan Hutan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1139	Luas tutupan hutan per tahun	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1140	Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1141	Luasan Fungsi Kawasan Hutan di areal Kawasan Transmigrasi	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Provinsi	Tahunan
1142	Nilai Kualitas air permukaan sebagai air baku	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1143	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah ditetapkan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1144	Penurunan Emisi CO2	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1145	Penurunan Emisi CO2	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1146	Penurunan emisi gas rumah kaca	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1147	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1148	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1149	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1150	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1151	Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1152	Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1153	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1154	Persentase sampah nasional yang terkelola	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	> Dua Tahunan
1155	Persentase sisa makanan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1156	Perubahan kuantitas air tanah	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1157	Perubahan parameter kualitas air permukaan dan air tanah	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1158	Perubahan parameter kualitas air sungai	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1159	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1160	Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1161	Rata-rata konsentrasi PM10 dalam satu tahun	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1162	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan.	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1163	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1164	Tambahan debit air baku	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1165	Tingkat emisi CO2	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1166	Total Emisi GRK	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1167	Total suspended solid (TSS) atau zat padat tersuspensi	Statistik	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1168	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kementerian Luar Negeri	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Luar Negeri	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1169	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
1170	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1171	Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1172	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1173	Indeks kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1174	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1175	Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1176	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1177	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1178	Indeks prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1179	Jumlah dan persebaran WNI di luar negeri	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Luar Negeri	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
1180	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1181	Nilai Persepsi Kepuasan Pengguna terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1182	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan peningkatan kerja sama kelautan yang diselesaikan	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1183	Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1184	Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder dalam negeri	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1185	Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1186	Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1187	Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima pada isu Pelindungan WNI pada forum internasional	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1188	Presentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	Statistik	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1189	Jumlah Artikel yang terpublikasi di Jurnal yang dikelola oleh Kemenparekraf	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Strategis Kemenparekraf 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1190	Jumlah branding wonderful Indonesia	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1191	Jumlah data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersedia dalam format database	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1192	Jumlah Desa Wisata	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1193	Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1194	Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1195	Jumlah Destinasi pariwisata super prioritas	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1196	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1197	Jumlah diklat pemasaran digital	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1198	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pada pelaku ekonomi kreatif	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1199	Jumlah kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1200	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan (destinasi) yang difasilitasi dan dikembangkan	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1201	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Perbatasan	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
1202	Jumlah Lulusan/Alumni di Poltekpar dibawah naungan Kemenparekraf	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Strategis Kemenparekraf 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1203	Jumlah Mahasiswa Aktif di Poltekpar dibawah naungan Kemenparekraf	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Strategis Kemenparekraf 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1204	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Infrastruktur (sarana dan prasarana)	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1205	Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi terkait industri halal dan ekonomi syariah	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1206	Jumlah pengembangan, pendampingan, dan inkubasi di ruang kreatif	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1207	Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1208	Jumlah Penyelenggaraan Event	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1209	Jumlah Program Revitalisasi Destinasi Bali	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1210	Jumlah publikasi/laporan statistik ekonomi kreatif yang dikembangkan	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1211	Jumlah revitalisasi ruang kreatif	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1212	Jumlah standar layanan dan pengelolaan di sektor pariwisata	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1213	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1214	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1215	Kontribusi nilai tambah ekonomi kreatif	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
1216	Nilai ekspor ekonomi kreatif	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1217	Nilai Realisasi Investasi Pariwisata	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1218	Nilai tambah ekonomi kreatif	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1219	Permintaan digital wisatawan terhadap destinasi budaya dan hiburan	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1220	Permintaan digital wisatawan terhadap destinasi wisata alam	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1221	Permintaan digital wisatawan untuk kategori daya tarik wisata non-rekreasi	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1222	Persentase Alumni Poltekpar dibawah naungan kemenparekraf Yang Bekerja di Sektor Pariwisata	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Strategis Kemenparekraf 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1223	Pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1224	Sebaran Jumlah Alumni Poltekpar dibawah Naungan Kemenparekraf Berdasarkan Lokasi Tempat Bekerja	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Strategis Kemenparekraf 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1225	Sebaran Pekerjaan Alumni Poltekpar dibawah Naungan Kemenparekraf	Statistik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rencana Strategis Kemenparekraf 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1226	Jumlah Bangunan Pengendali Banjir	Geospasial	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
1227	Luas Daerah Irigasi	Geospasial	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
1228	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	Geospasial	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
1229	Panjang Bangunan Pengendali Banjir	Geospasial	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1230	Peta Air Tanah	Geospasial	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
1231	Peta Daerah Aliran Sungai (Klasifikasi DAS)	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1232	Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:5.000	Tahunan
1233	Peta Daerah Irigasi Rawa	Geospasial	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
1234	Peta Daerah Irigasi Rawa skala skala 1:5.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:5.000	Tahunan
1235	Peta Daerah Irigasi Tambak skala skala 1:5.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:5.000	Tahunan
1236	Peta Jalan Kabupaten/Kota	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1237	Peta Jalan Nasional	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1238	Peta Jalan Provinsi	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1239	Peta Jalan Tol	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1240	Peta jaringan irigasi teknis yang dibangun	Geospasial	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
1241	Peta Kawasan Permukiman Kumuh	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1242	Peta Ketersediaan Air	Geospasial	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1243	Peta Sebaran Lokasi Rusunawa	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1244	Jumlah Bendungan/Waduk dan Bendung di Indonesia	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1245	Jumlah embung, situ, danau dan kolam retensi Indonesia	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1246	Jumlah Irigasi (Kewenangan Pusat, Provinsi, Kabupaten)	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1247	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1248	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1249	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1250	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1251	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1252	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1253	Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1254	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1255	Jumlah Ketersediaan Air	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1256	Jumlah kota yang terdapat flyover/underpass, dinyatakan dalam jumlah kota	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1257	Jumlah luas daerah irigasi premium	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1258	Jumlah luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1259	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1260	Jumlah PDAM	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1261	Jumlah PDAM yang berkinerja sehat	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1262	Jumlah pengembangan kapasitas SPAM regional	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1263	Jumlah perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1264	Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1265	Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1266	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1267	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1268	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1269	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERA	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1270	Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berasal dari jaringan perpipaan	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1271	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1272	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1273	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1274	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1275	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1276	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1277	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1278	Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1279	Kemantapan Jalan Nasional	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1280	Kemantapan Jalan Provinsi	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1281	Luas Daerah Irigasi dalam keadaan rusak	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1282	Luas daerah irigasi yang dimodernisasi	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1283	Luas lahan irigasi berdasarkan kewenangan	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1284	Panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
1285	Panjang Jalan Prioritas Nasional yang terbangun	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1286	Panjang jalan tol yang telah dioperasikan	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1287	Panjang Jembatan Prioritas Nasional yang terbangun	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1288	Panjang Pembangunan Jalan Tol	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1289	Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1290	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1291	Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1292	Persentase rumah tangga (RT) yang terlayani sanitasi layak	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Provinsi	Tahunan
1293	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	Statistik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1294	Peta Daerah Irigasi Permukaan	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1295	Presentase dan Kondisi Kemantapan Jalan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Kabupaten/Kota	Tahunan
1296	Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Kabupaten/Kota	Tahunan
1297	Indeks Kualitas Keluarga	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1298	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1299	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1300	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1301	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	> Dua Tahunan
1302	Persentase ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin menurut bidang (dasar hukum umum, kekerasan terhadap perempuan, lapangan kerja dan ekonomi, perkawinan dan keluarga)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	> Dua Tahunan
1303	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1304	Persentase perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik dan/atau seksual) yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1305	Prevalensi anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1306	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1307	Proporsi perempuan dan laki-laki umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	> Dua Tahunan
1308	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	> Dua Tahunan
1309	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Statistik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	> Dua Tahunan
1310	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Provinsi	Tahunan
1311	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1312	Jumlah atlet elit junior nasional	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1313	Jumlah atlet elit nasional	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1314	Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1315	Jumlah kebijakan turunan UU Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional dan terkait Manajemen Talenta Nasional yang disusun dan dimanfaatkan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1316	Jumlah olahragawan andalan nasional yang lolos kualifikasi Olimpiade	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1317	Jumlah olahragawan andalan nasional yang lolos kualifikasi Paralimpiade	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1318	Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1319	Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat internasional dan nasional	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1320	Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1321	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1322	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1323	Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1324	Jumlah sentra pembinaan yang telah beroperasi di daerah sesuai Desain Besar Olahraga	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1325	Jumlah talenta muda	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1326	Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat internasional	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1327	Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat nasional	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1328	Peringkat pada Olympic Games	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1329	Peringkat pada Paralympic Games	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1330	Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLM	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1331	Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLP dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO)	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1332	Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahragawan Paralimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia (SKODI)	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1333	Persentase olahragawan muda cabang olahraga Olimpik pada olahragawan andalan nasional	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1334	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1335	Persentase PPLPD di tingkat kabupaten/kota yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	Statistik	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1336	Hasil Pengukuran Indeks BerAKHLAK	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1337	Indeks Pelayanan Publik tingkat K/L	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
1338	Indeks Pelayanan Publik tingkat Kab/Kota	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
1339	Indeks Pelayanan Publik tingkat Provinsi	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
1340	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat K/L	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1341	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Kab/Kota	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1342	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Provinsi	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1343	Jumlah instansi dengan nilai SKM "Baik"	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1344	Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP \geq B	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1345	Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1346	Jumlah IP yang dilakukan piloting kebijakan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN yang fleksibel	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1347	Nilai Indeks SPBE Nasional	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1348	Persentase inovasi yang memenuhi standar inovasi pelayanan publik	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1349	Persentase instansi pemerintah Pusat dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1350	Persentase IP yang menggunakan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1351	Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan manajemen talenta ASN	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1352	Persentase Kab/Kota dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dDan Reformasi Birokrasi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1353	Persentase Pegawai ASN yang aktif menggunakan fitur learning pada platform tunggal	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1354	Persentase Provinsi dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1355	Persentase rekomendasi RB Nasional yang ditindaklanjuti	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1356	Skor employee branding	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1357	Skor employee engagement	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1358	Skor Indeks pada domain layanan pada SPBE	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1359	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1360	Skor rata-rata nilai SKM secara nasional	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1361	Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas kinerja pelayanan publik	Statistik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1362	Angka Kesiapan Sekolah	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1363	Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1364	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1365	Indeks Pemerataan Guru	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	> Dua Tahunan
1366	Jumlah anak tidak sekolah pada SD/ sederajat dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1367	Jumlah anak tidak sekolah pada SMA/ sederajat dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1368	Jumlah anak tidak sekolah pada SMP/ sederajat dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1369	Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen kompetensi pada aspek literasi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1370	Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen kompetensi pada aspek numerasi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1371	Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek literasi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1372	Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek numerasi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1373	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1374	Jumlah benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1375	Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1376	Jumlah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau insentif tepat waktu	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1377	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1378	Jumlah guru di jenjang PAUD/ sederajat, TK/ sederajat, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat dan SMK/ sederajat berdasarkan status kepegawaian	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Renstra SETJEN DPR RI	Kabupaten/Kota	Tahunan
1379	Jumlah guru di sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan status kepegawaian	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Renstra SETJEN DPR RI	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1380	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dana transfer daerah bidang pendidikan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1381	Jumlah kab/kota yang menyediakan layanan PAUD-HI	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1382	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1383	Jumlah kesepakatan kerja sama antara industri/swasta dengan satuan pendidikan vokasi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1384	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1385	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarannya	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1386	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1387	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1388	Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1389	Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1390	Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1391	Jumlah pendidik (dosen) pendidikan tinggi berkualifikasi S3	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1392	Jumlah pendidik SD	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1393	Jumlah pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1394	Jumlah pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1395	Jumlah pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi Vokasi, dan kursus/pelatihan yang mendapatkan pelatihan bidang pendidikan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1396	Jumlah pendidik SLB	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1397	Jumlah pendidik SLB dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1398	Jumlah pendidik SLB yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1399	Jumlah pendidik SMA	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1400	Jumlah pendidik SMA dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1401	Jumlah pendidik SMA yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1402	Jumlah pendidik SMK	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1403	Jumlah pendidik SMK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1404	Jumlah pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1405	Jumlah pendidik SMP	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1406	Jumlah pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1407	Jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1408	Jumlah pendidik TK	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1409	Jumlah pendidik TK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1410	Jumlah pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1411	Jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1412	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin yang masih bersekolah	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1413	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1414	Jumlah penyandang kebutuhan khusus yang masih sekolah	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Renstra SETJEN DPR RI	Provinsi	Tahunan
1415	Jumlah Perguruan Tinggi terakreditasi A	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1416	Jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam world class university	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1417	Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan D1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1418	Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan D2	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1419	Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan D3	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1420	Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan D4	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1421	Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1422	Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan S2	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1423	Jumlah peserta didik SD	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1424	Jumlah peserta didik SLB	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1425	Jumlah peserta didik SMA	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1426	Jumlah peserta didik SMK	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1427	Jumlah peserta didik SMP	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1428	Jumlah peserta didik TK	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1429	Jumlah produksi film, musik, dan media baru	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1430	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1431	Jumlah provinsi memenuhi SPM pendidikan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1432	Jumlah registrasi benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1433	Jumlah registrasi warisan budaya takbenda	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1434	Jumlah satuan pendidikan formal/ non formal yang sudah menerapkan materi ajar kewirausahaan	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Renstra SETJEN DPR RI	Provinsi	Tahunan
1435	Jumlah satuan pendidikan SD	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1436	Jumlah satuan pendidikan SLB	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1437	Jumlah satuan pendidikan SMA	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1438	Jumlah satuan pendidikan SMK	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1439	Jumlah satuan pendidikan SMP	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1440	Jumlah satuan pendidikan TK	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1441	Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1442	Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1443	Jumlah SD yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1444	Jumlah SD yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1445	Jumlah SD yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1446	Jumlah SD yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1447	Jumlah SD yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1448	Jumlah SD yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1449	Jumlah sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan layanan pendidikan	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Renstra SETJEN DPR RI	Kabupaten/Kota	Tahunan
1450	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1451	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1452	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1453	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1454	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1455	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1456	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1457	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1458	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1459	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1460	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1461	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1462	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1463	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1464	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1465	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1466	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1467	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1468	Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1469	Jumlah SMP yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1470	Jumlah SMP yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1471	Jumlah SMP yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1472	Jumlah SMP yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1473	Jumlah SMP yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1474	Jumlah SMP yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1475	Jumlah sumber daya manusia IPTEK (dosen)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1476	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1477	Jumlah warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1478	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1479	Nilai Budaya Literasi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1480	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1481	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1482	Nilai Dimensi Warisan Budaya	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1483	Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1484	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1485	Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1486	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1487	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1488	Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1489	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1490	Persentase pendidik SLB dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1491	Persentase pendidik SLB yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1492	Persentase pendidik SMA dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1493	Persentase pendidik SMA yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1494	Persentase pendidik SMK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1495	Persentase pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1496	Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1497	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1498	Persentase pendidik TK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1499	Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1500	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1501	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1502	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1503	Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1504	Persentase satuan pendidikan terlayani internet untuk tujuan menunjang pembelajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1505	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1506	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1507	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1508	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1509	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1510	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1511	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1512	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1513	Proporsi SD yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1514	Proporsi SD yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1515	Proporsi SD yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1516	Proporsi SD yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1517	Proporsi SD yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1518	Proporsi SD yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1519	Proporsi SLB yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1520	Proporsi SLB yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1521	Proporsi SLB yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1522	Proporsi SLB yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1523	Proporsi SLB yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1524	Proporsi SLB yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1525	Proporsi SMA yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1526	Proporsi SMA yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1527	Proporsi SMA yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1528	Proporsi SMA yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1529	Proporsi SMA yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1530	Proporsi SMA yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1531	Proporsi SMK yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1532	Proporsi SMK yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1533	Proporsi SMK yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1534	Proporsi SMK yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1535	Proporsi SMK yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1536	Proporsi SMK yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1537	Proporsi SMP yang memiliki fasilitas air minum layak	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1538	Proporsi SMP yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1539	Proporsi SMP yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1540	Proporsi SMP yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1541	Proporsi SMP yang memiliki fasilitas listrik	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1542	Proporsi SMP yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1543	Rata-rata Nilai Programme for International Student Assessment (PISA) (matematika, membaca, sains)	Statistik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	> Dua Tahunan
1544	Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1545	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1546	Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1547	Jumlah kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang diikuti	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1548	Jumlah konsumen yang diedukasi cinta produk dalam negeri	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1549	Jumlah pasar tradisional/rakyat	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Perdagangan	Renstra SETJEN DPR RI	Kabupaten/Kota	Tahunan
1550	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan)	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1551	Jumlah pengawasan post border	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1552	Jumlah Preferential Trade Agreement/ Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement yang disepakati	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1553	Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1554	Jumlah promosi terintegrasi	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1555	Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1556	Jumlah rencana kegiatan promosi produk ke luar negeri	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1557	Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek Pengembangan Produk dan Kemasan	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1558	Jumlah UMKM yang mengikuti Export Coaching Program	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1559	Jumlah UMKM yang mengikuti Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1560	Neraca perdagangan barang	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
1561	Persentase ekspor hasil pertanian (fob)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1562	Persentase pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1563	Persentase pangsa pasar ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	Statistik	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1564	Pertumbuhan impor produk non migas	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Perdagangan	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
1565	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
1566	Nilai Mapping Pinjaman Dalam dan Luar Negeri	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Triwulanan
1567	Nilai Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri khusus untuk Badan Intelijen Negara	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Triwulanan
1568	Nilai Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri khusus untuk Kementerian Pertahanan	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Triwulanan
1569	Nilai Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri khusus untuk Kepolisian Republik Indonesia	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Triwulanan
1570	Nilai Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Kementerian Sekretariat Negara	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Triwulanan
1571	Biaya Logistik Nasional (% PDB)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Nasional	Tahunan
1572	Dokumen Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1573	Dokumen Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1574	Dokumen Penilaian Kelayakan Teknis Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1575	Dokumen Penilaian Kelayakan Teknis Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1576	Jumlah bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian dari mitra pembangunan bilateral	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1577	Jumlah belanja pemerintah untuk sektor pendidikan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1578	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1579	Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1580	Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1581	Jumlah koperasi yang menerima pembinaan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1582	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kewirausahaan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1583	Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1584	Jumlah pencalonan yang berhasil pada tahun berjalan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1585	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1586	Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1587	Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1588	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1589	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1590	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
1591	Jumlah Proyek yang masuk dalam Daftar Rencana Proyek KPBU dengan status siap ditawarkan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
1592	Jumlah Proyek yang sedang dalam proses Prakualifikasi pada tahun berjalan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
1593	Jumlah strategi sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik terpadu sistem jaminan sosial nasional	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1594	Jumlah wirausaha yang diinkubasi	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1595	Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Triwulanan
1596	Mapping Hibah Terencana Luar Negeri	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1597	Mapping Pinjaman Luar Negeri Umum	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1598	Nilai aspek bantuan hukum pada Indeks Akses terhadap Keadilan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1599	Nilai aspek kemampuan masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1600	Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1601	Persentase anggaran responsif gender	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1602	Persentase capaian proyek pada proyek prioritas pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1603	Persentase capaian proyek pada proyek prioritas peningkatan peran dan fungsi BPIP	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1604	Persentase capaian proyek prioritas pada kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1605	Persentase penurunan emisi GRK	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1606	Persentase penurunan intensitas emisi GRK	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1607	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1608	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1609	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1610	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1611	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1612	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1613	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045	Kabupaten/Kota	Tahunan
1614	Skor Indeks Akses Terhadap Keadilan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1615	Skor Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
1616	Skor Indeks Pembangunan Hukum	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1617	Skor Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	> Dua Tahunan
1618	Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Perhubungan	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1619	Peta Sebaran Bandar Udara skala 1:50.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Perhubungan	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1620	Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api skala 1:50.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Perhubungan	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1621	Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Perhubungan	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1622	Peta Sebaran Terminal Tipe A skala 1:50.000	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Perhubungan	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1623	Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	> Dua Tahunan
1624	Jumlah Alokasi Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1625	Jumlah Bandar Udara	Statistik	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Kementerian Perhubungan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Provinsi	Tahunan
1626	Jumlah Bandar Udara Pendukung Jembatan Udara yang Dikembangkan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1627	Jumlah Bandar Udara Penghubung (Hub) Skala Pelayanan Primer yang Mendapatkan Kegiatan Rehabilitasi / Pengembangan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1628	Jumlah Bandar Udara yang Dibangun dan Dikembangkan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1629	Jumlah Barang Berdasarkan Moda Transportasi	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1630	Jumlah Bus yang Mendukung Operasional Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1631	Jumlah Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1632	Jumlah Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1633	Jumlah Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut)	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1634	Jumlah Kajian Penyiapan Bandar Udara Perairan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1635	Jumlah Kapal Negara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1636	Jumlah Kegiatan Jalan Yang Berkeselamatan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1637	Jumlah Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi dan Pembangunan Jalur Kereta Api	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1638	Jumlah Kota Metropolitan dengan Sistem Angkutan Umum Massal yang Dibangun dan Dikembangkan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1639	Jumlah Kota Metropolitan yang Membangun atau Mengembangkan Angkutan Massal Berbasis Jalan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1640	Jumlah Kota Metropolitan yang Membangun atau Mengembangkan Angkutan Massal Berbasis Rel	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1641	Jumlah Kota Selain Kota Metropolitan yang Menerapkan Sistem Angkutan Umum Massal yang Dibangun dan Dikembangkan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1642	Jumlah Layanan Angkutan Bahan Bakar Minyak untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang dan Perintis Kargo	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1643	Jumlah Layanan Angkutan Udara Perintis Kargo	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1644	Jumlah Layanan Angkutan Udara Perintis Penumpang	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1645	Jumlah Layanan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian yang Tersedia	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1646	Jumlah Layanan Subsidi Angkutan Udara Kargo	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1647	Jumlah Lintas Penyeberangan Perintis yang Dilayani	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1648	Jumlah pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1649	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1650	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Baru yang Dibangun	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1651	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1652	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan Sungai yang Dibangun	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1653	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1654	Jumlah Pelabuhan Utama yang Memenuhi Standar	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1655	Jumlah Pelabuhan yang Dibangun dan Dikembangkan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1656	Jumlah Pelabuhan yang Memperoleh Layanan Informasi Cuaca Maritim dan Prakiraan Tinggi Gelombang	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1657	Jumlah Pelanggaran Dimensi dan Daya Angkut Kendaraan Bermotor Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (Over Load Over Dimension (ODOL)	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Perhubungan	Renstra SETJEN DPR RI	Provinsi	Tahunan
1658	Jumlah Pelayaran dengan Trayek Tetap dan Teratur (Liner)	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1659	Jumlah Penerbangan Tepat Waktu	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1660	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1661	Jumlah Penumpang berdasarkan Moda Transportasi	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1662	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) Perusahaan Angkutan Umum	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1663	Jumlah Rute Angkutan Khusus Ternak	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1664	Jumlah Rute Angkutan Udara Niaga Berjadwal	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1665	Jumlah Rute Jembatan Udara yang Dioperasikan	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1666	Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1667	Jumlah Terminal Penumpang dan Terminal Barang Antar Lintas Batas Negara yang Dibangun	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1668	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang Ditingkatkan/Direvitalisasi	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1669	Jumlah Trayek Angkutan Jalan Perintis yang Dilayani	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1670	Jumlah Trayek Layanan Tol Laut, Angkutan Laut Perintis, dan Angkutan Laut Khusus Ternak	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1671	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang Dibangun dan Ditingkatkan/Direvitalisasi	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1672	Panjang Jalur Kereta api yang Aktif/Beroperasi	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1673	Panjang Jalur Kereta Api yang Aktif/Beroperasi dan Tidak Aktif/Tidak Beroperasi	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1674	Panjang Jalur Kereta Api yang Dibangun (Termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi)	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1675	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan/Direhabilitasi	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1676	Panjang Jalur Kereta Api yang Terbangun (Kumulatif)	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1677	Persentase capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Udara	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1678	Persentase Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1679	Persentase Panjang Rel Kereta Api berdasarkan Track Quality Index (TQI)	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1680	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api dalam 1 Juta Km Tempuh	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1681	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Perhubungan	Renstra Kementerian Perhubungan	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1682	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara per 1 Juta Keberangkatan (Departure)	Statistik	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1683	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Perhubungan	Renstra Kementerian Perhubungan	Nasional	Tahunan
1684	Tingkat Keandalan Kenavigasian	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Perhubungan	Renstra Kementerian Perhubungan	Nasional	Tahunan
1685	Jumlah industri halal yang difasilitasi	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1686	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan Sertifikasi Produk	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1687	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1688	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1689	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1690	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Esmart Industri Kecil dan Menengah	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1691	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1692	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan Sertifikasi Produk	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1693	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1694	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan perlindungan merk	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1695	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan perbaikan kemasan	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1696	Jumlah inkubator bisnis alas kaki melalui Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1697	Jumlah Kawasan Industri (KI) operasional	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Semesteran
1698	Jumlah Kawasan Industri Tematik Halal yang Beroperasi	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Semesteran
1699	Jumlah kebijakan/rancangan kebijakan pemberdayaan industri halal	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1700	Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1701	Jumlah lulusan pelatihan vokasi industri	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1702	Jumlah Perusahaan / Industri yang difasilitasi program restrukturisasi	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1703	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1704	Jumlah Perusahaan Industri yang memperoleh nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index diatas 3.0	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1705	Jumlah perusahaan yang difasilitasi kemitraan dalam global value chain	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1706	Jumlah Peserta Fasilitasi kelompok usaha / unit bisnis Pondok Pesantren	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1707	Jumlah peserta Start-Up Berbasis Teknologi melalui Bali Creative Industry Center	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1708	Jumlah Produk Dalam Negeri Bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1709	Jumlah Produk tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri > 25% yang masih berlaku	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1710	Jumlah Produsen Alat dan Mesin Pertanian	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1711	Jumlah promosi produk industri halal berskala internasional	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1712	Jumlah rancangan kebijakan penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1713	Jumlah rancangan standar industri hijau	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1714	Jumlah rancangan/kebijakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor industri	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1715	Jumlah rekomendasi kerja sama industri dalam rangka pemberdayaan industri halal	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1716	Jumlah sentra industri kecil dan menengah di luar Jawa yang beroperasi	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1717	Jumlah tenaga kerja pada Kawasan Industri	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1718	Jumlah tenaga kerja pada Smelter	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1719	Jumlah Tenant Inkubator Bisnis	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1720	Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang memiliki izin usaha (Realisasi Kumulatif)	Statistik	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1721	Nilai Produksi Alat dan Mesin Pertanian	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1722	Nilai produksi pupuk di Indonesia	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1723	Rata-rata persentase efisiensi industri semen dan pupuk yang menerapkan prinsip industri hijau	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Perindustrian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1724	Jumlah pos pamtas (pengamanan perbatasan) dan posal (POS TNI Angkatan Laut)	Statistik	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1725	Luas wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang dapat dijaga keutuhannya	Statistik	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1726	Panjang jalan inspeksi patroli perbatasan	Statistik	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1727	Persentase luas wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang dapat dijaga keutuhannya	Statistik	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1728	Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Geospasial	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	1:50.000	Tahunan
1729	Peta Lahan Pekebunan	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pertanian	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1730	Peta Lahan Pertanian Hortikultura	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pertanian	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1731	Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pertanian	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1732	Peta Lahan Peternakan	Geospasial	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pertanian	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1:50.000	Tahunan
1733	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kementerian Pertanian	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pertanian	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1734	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Kementerian Pertanian	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pertanian	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1735	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Pertanian	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1736	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Peternakan	Statistik	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Pertanian	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Provinsi	Tahunan
1737	Jumlah aksesi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SDGPP) tanaman	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1738	Jumlah bantuan unit pengolahan pupuk organik yang disalurkan	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1739	Jumlah Kawasan Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Kementerian Pertanian	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Kabupaten/Kota	Tahunan
1740	Jumlah korporasi petani yang dikembangkan	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1741	Jumlah Penggunaan Benih Bersertifikat (Padi, Jagung & Kedelai)	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1742	Jumlah petani pekebun perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1743	Jumlah petani penerima subsidi premi Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS)	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1744	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1745	Jumlah Produksi daging	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1746	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Kementerian Pertanian	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Kabupaten/Kota	Tahunan
1747	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1748	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1749	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan atau Pangan	Statistik	Badan Pangan Nasional	Kementerian Pertanian	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Provinsi	Tahunan
1750	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor hortikultura	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1751	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1752	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Pertanian	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1753	Jumlah unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibangun	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1754	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1755	Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1756	Luas lahan beririgasi	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	> Dua Tahunan
1757	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1758	Luas lahan sawah yang menerima subsidi premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1759	Luas Panen Komoditas Pertanian	Statistik	Badan Pangan Nasional	Kementerian Pertanian	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Kabupaten/Kota	Tahunan
1760	Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1761	Luas panen komoditas pertanian sektor tanaman pangan (kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau & kacang tanah)	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan
1762	Luas Tanam Komoditas Pertanian	Statistik	Badan Pangan Nasional	Kementerian Pertanian	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Kabupaten/Kota	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1763	Luas Total Lahan Pertanian Pangan	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	> Dua Tahunan
1764	Perkiraan Musim Panen Komoditas	Statistik	Badan Pangan Nasional	Kementerian Pertanian	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Nasional	Tahunan
1765	Perkiraan Musim Tanam Komoditas	Statistik	Badan Pangan Nasional	Kementerian Pertanian	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Nasional	Tahunan
1766	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Statistik	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1767	Peta luas lahan perkebunan komoditas strategis (kelapa sawit, tembakau, karet, kopi, teh, dan tebu)	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Pertanian	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
1768	Jumlah Keppres Pemberhentian Pejabat Lainnya	Statistik	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara	Renstra Kementerian Sekretariat Negara	Nasional	Tahunan
1769	Jumlah Keppres Pemberhentian Pejabat Negara	Statistik	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara	Renstra Kementerian Sekretariat Negara	Nasional	Tahunan
1770	Jumlah Keppres Pengangkatan Pejabat Lainnya	Statistik	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara	Renstra Kementerian Sekretariat Negara	Nasional	Tahunan
1771	Jumlah Keppres Pengangkatan Pejabat Negara	Statistik	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara	Renstra Kementerian Sekretariat Negara	Nasional	Tahunan
1772	Jumlah Keppres Pensiun Pejabat Negara	Statistik	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara	Renstra Kementerian Sekretariat Negara	Nasional	Tahunan
1773	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1774	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1775	Angka kejadian konflik	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1776	Angka korban pengungsi internal	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1777	Clearance rate	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1778	Clearance rate terorisme	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1779	Clearance rate tindak pidana laut	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1780	Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Indeks Harkamtibmas)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1781	Indeks penegakan hukum (Indeks Gakkum)	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1782	Jumlah almatsus dan alpalkam kepolisian	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1783	Jumlah anggota satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1784	Jumlah Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Statistik	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Triwulanan
1785	Jumlah korban meninggal akibat konflik	Statistik	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Triwulanan
1786	Jumlah korban meninggal dari kecelakaan lalu lintas	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1787	Jumlah objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Semesteran
1788	Jumlah rumah sakit yang dibangun/meningkat akreditasinya	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1789	Jumlah unit pemenuhan rumah negara	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1790	Persentase almatsus dan alpalkam kontribusi industri pertahanan	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1791	Persentase Pelayanan publik Polri yang prima	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1792	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Bulanan
1793	Indeks Integritas Instansi	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Komisi Pemberantasan Korupsi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1794	Indeks Integritas Nasional	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Komisi Pemberantasan Korupsi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1795	Indeks Integritas Wilayah Provinsi	Statistik	Badan Pusat Statistik	Komisi Pemberantasan Korupsi	Rancangan Akhir RFJPN 2020-2045	Provinsi	Tahunan
1796	Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	Statistik	Komisi Pemberantasan Korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	> Dua Tahunan
1797	Indeks Persaingan Usaha	Statistik	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 83 SJ/Kep/VI/2023	Nasional	Tahunan
1798	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Komisi Yudisial Republik Indonesia	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Komisi Yudisial Republik Indonesia	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1799	Indeks Integritas Hakim	Statistik	Komisi Yudisial Republik Indonesia	Komisi Yudisial Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1800	Jumlah Alumni Diklat pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan (PKN TK I, PKN TK II, PKA, PKP), Pelatihan Teknis, Sosial Kultural, dan Pelatihan Fungsional	Statistik	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1801	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik pada Laboratorium Inovasi	Statistik	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1802	Jumlah Lembaga Pelatihan Terakreditasi (PKN TK II, PKA, PKP, Latsar CPNS, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional)	Statistik	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara	Rencana Strategis LAN Tahun 2020-2024	Nasional	Bulanan
1803	Jumlah Peserta Diklat pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan (PKN TK I, PKN TK II, PKA, PKP), Pelatihan Teknis, Pelatihan Sosial Kultural dan Pelatihan Fungsional	Statistik	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1804	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Statistik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Kabupaten/Kota	Tahunan
1805	Jumlah Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik	Statistik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rencana Kerja LKPP Tahun 2023	Kabupaten/Kota	Bulanan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1806	Jumlah Produk Dalam Negeri yang Tayang di Katalog Elektronik	Statistik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rencana Kerja LKPP Tahun 2023	Kabupaten/Kota	Bulanan
1807	Jumlah Produk yang Tayang di Katalog Elektronik	Statistik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Bulanan
1808	Jumlah Sistem yang terintegrasi dengan Sistem informasi katalog elektronik dan e-purchasing lainnya berdasarkan Instansi Pengelola	Statistik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1809	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berdasarkan Tingkat Kematangan	Statistik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rencana Kerja LKPP Tahun 2023	Kabupaten/Kota	Triwulanan
1810	Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD	Statistik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rencana Kerja LKPP Tahun 2023	Kabupaten/Kota	Tahunan
1811	Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD	Statistik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rencana Kerja LKPP Tahun 2023	Kabupaten/Kota	Bulanan
1812	Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD	Statistik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rencana Kerja LKPP Tahun 2023	Kabupaten/Kota	Bulanan
1813	Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri KLPD dan BUMN	Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022	Kabupaten/Kota	Bulanan
1814	Nilai Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD	Statistik	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022	Kabupaten/Kota	Bulanan
1815	Jumlah Aset RRI	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
1816	Cakupan Coverage Siaran TV Digital LPP TVRI	Geospasial	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	PM Kominfo No 6. Tahun 2019	Nasional	Tahunan
1817	Jumlah Aset TVRI	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
1818	Jumlah Lembaga Penyiaran TV Penyewa MUX TV Digital LPP TVRI	Statistik	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Dokumen Sewa Multiplexing Direktorat Pengembangan dan Usaha	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1819	Jumlah Lokasi Stasiun Transmisi TV Digital LPP TVRI di Daerah 3T	Statistik	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Dokumen Transmisi Direktorat Teknik	Nasional	Tahunan
1820	Jumlah Lokasi Stasiun Transmisi TV Digital LPP TVRI secara Nasional	Statistik	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Dokumen Transmisi Direktorat Teknik	Nasional	Tahunan
1821	Jumlah Penyewa Aset Lahan dan Menara LPP TVRI	Statistik	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Dokumen KSO Direktorat Pengembangan dan Usaha	Nasional	Tahunan
1822	Jumlah Satuan Transmisi dan Studio Program Digitalization Broadcasting System	Statistik	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Perjanjian Kerjasama Dirjen PPI Kominfo dengan LPP TVRI	Nasional	Tahunan
1823	Nilai Pengusulan Hibah Terencana Luar Negeri (DRKH) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1824	Nilai Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Umum (DRPLN-JM/Blue Book, dan DRPPLN/Green Book) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Keuangan	Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Nasional	Tahunan
1825	Jumlah Penilaian Restitusi	Statistik	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Renstra Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Nasional	Triwulanan
1826	Jumlah permohonan perlindungan yang diajukan Saksi dan/atau Korban tindak pidana	Statistik	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Renstra Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Nasional	Triwulanan
1827	Jumlah Program Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana	Statistik	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Renstra Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Nasional	Triwulanan
1828	Jumlah Terlindung LPSK	Statistik	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Renstra Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Nasional	Triwulanan
1829	Jumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Bulanan
1830	Jumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan inkonstitusional bersyarat	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Bulanan
1831	Jumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan konstitusional bersyarat	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Bulanan
1832	Persentase judicial review yang dikabulkan MK	Statistik	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1833	Jumlah data Pelaksanaan Penerimaan Delegasi ke MPR RI	Statistik	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1834	Jumlah data Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihan	Statistik	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1835	Jumlah Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Statistik	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1836	Jumlah Register Pemohon Informasi Layanan Publik	Statistik	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024	Nasional	Tahunan
1837	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Statistik	Ombudsman Republik Indonesia	Ombudsman Republik Indonesia	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Nasional	Tahunan
1838	Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis	Statistik	Dewan Perwakilan Rakyat	Ombudsman Republik Indonesia	Renstra SETJEN DPR RI	Nasional	Tahunan
1839	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI perwakilan yang diselesaikan	Statistik	Ombudsman Republik Indonesia	Ombudsman Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Triwulanan
1840	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI pusat yang diselesaikan	Statistik	Ombudsman Republik Indonesia	Ombudsman Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Triwulanan
1841	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI	Statistik	Ombudsman Republik Indonesia	Ombudsman Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1842	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI berdasarkan Substansi laporan/pengaduan	Statistik	Ombudsman Republik Indonesia	Ombudsman Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Triwulanan
1843	Skor Hasil Penilaian Ombudsman RI terkait Pelayanan Publik	Statistik	Komisi Pemberantasan Korupsi	Ombudsman Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Individu	Tahunan
1844	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1845	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Provinsi	Tahunan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1846	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1847	Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1848	Jumlah Pojok Baca Digital di daerah	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Tahunan
1849	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1850	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1851	Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1852	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1853	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1854	Tingkat Kegemaran Membaca	Statistik	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Provinsi	Tahunan
1855	Financial Integrity Rating Index on Money Laundering and Terrorist Financing Indonesia	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Renstra PPATK 2023-2024	Nasional	Tahunan
1856	Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Renstra PPATK 2023-2024	Nasional	Tahunan
1857	Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Nasional	Tahunan
1858	Jumlah Hasil Analisis (HA) terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/ Stakeholders	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1859	Jumlah Hasil Pemeriksaan (HP) terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/ Stakeholders	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1860	Jumlah Informasi terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang disampaikan oleh PPATK kepada Kementerian/ Lembaga	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1861	Jumlah Nota Kesepahaman (MoU) antara PPATK dengan Instansi/Lembaga	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1862	Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dari PPATK	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1863	Jumlah Penerimaan Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) Biasa, Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai, dan Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1864	Jumlah Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi (LPT)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1865	Jumlah Penerimaan Laporan Penyedia Barang dan/atau Jasa (LTPBJ)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1866	Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1867	Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1868	Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1869	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1870	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1871	Jumlah Penyelenggaraan Seminar/Webinar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan

No	Nama Data	Jenis Data	Instansi Pengusul	Instansi Produsen Data	Sumber Referensi	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran
1872	Jumlah Permintaan Informasi dalam pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1873	Jumlah Pertukaran Informasi dengan berbagai Financial Intelligence Unit (FIU) luar negeri dalam pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1874	Jumlah pihak pelapor Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang mendapatkan sanksi atas keterlambatan pelaporan kepada PPATK	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Triwulanan
1875	Jumlah Pihak Pelapor yang mengikuti Bimbingan Teknis PPATK	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Triwulanan
1876	Jumlah Pihak Pelapor yang telah Diaudit oleh PPATK	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1877	Jumlah Pihak Pelapor yang terdaftar pada aplikasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPATK (GoAML)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	Bulanan
1878	Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	FATF Recommendations	Nasional	Tahunan
1879	Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPT	Statistik	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010	Nasional	> Dua Tahunan

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas



Teni Widuriyanti